

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Absori, *Pemikiran Hukum Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Diindonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Ali, M. *Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 1998.
- Ali Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Widyatama, Bandung, 1999.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991.
- *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Arief, Barda N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Ke 2. Kencana. Jakarta, 2010.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana.*: Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Bustan, Nadjib. *Pengantar Epidemiologi*, Rineka Cipta Jakarta 2012.
- Didik Endro Purwoleksono, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2008
- Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
- Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Absolute Media, Yogyakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, BinaAksara Jakarta, 1987
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Hukum Penitensier*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.
- Tri Andarisman, *Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 1997
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang KPK.

C. SUMBER LAIN

1. Maman Budiman, *Problematika Penerapan Pasal 2 Dan 18 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016, Bandung, 2016.
2. Maman Budiman, *Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020, Bandung, 2020.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2009.
4. Juan Maulana Alfredo, Rama Halim Nur Azmi, Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial(Si Pansos)di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan, Jurnal Antikorupsi, 6 (2) 283-296e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118XDOI: 10.32697/integritas.v6i2.668 ©Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Febrikusuma, Thomas W., Soponyono, Eko., & Purwoto. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.2), pp.1-11.
6. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences “Dampak Pandemi *Covid-19* Bagi Perekonomian Masyarakat Desa” jurnal Volume 1 Nomor 1, Oktober 2020
7. <https://www.dw.com/id/20-tahun-penjara-bagi-jaksa-urip/a-361933>, diakses 21 Januari 2021, Pukul 20:44 WIB.
8. <https://insidelombok.id/berita-utama/ikhtiar-aph-di-ntb-berantas-korupsi-ibarat-macan-ompong/> diakses 21 Januari 2021, Pukul 20:50 WIB.
9. Heldavidson. (2020). First *Covid-19* case happened in November, China government records show— report2020. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>.
10. World Health Organization. (2020). Who DirectorGeneral’s Opening Remarks At The Media Briefing On *Covid-19* – 11 March 2020. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020>
11. <http://id.wikipedia.org>, “Keadaan Darurat”, diakses tanggal 21 April 2021.
12. <http://www.indonesiamedia.com>, “Kronologi Krisis di Indonesia“, diakses tanggal 21 April 2021.
13. <http://www.bi.go.id>, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, dan Peran IMF”, diakses tanggal 21 April 2021.
14. <https://covid19.go.id/>

15. <https://rsupsoeradji.id/mengapa-covid-19-disebut-sebagai-pandemi/> diakses 21 April 2021, pukul 10 Wib.
16. <https://kesmas.kemkes.go.id/>
17. Lumbanrau, Raja Eben. (2020). Virus corona: Triliunan dana bansos akan digelontorkan, 'perlu pengawasan dan pendataan ketat'. Diakses pada 24 April 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>
18. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200730203801-12-530862/terduga-korupsi-bansos-corona-dari-wali-kota-hingga-ketua-rt>. Diakses pada 24 April 2021 Pkl 13:34 Wib.
19. <https://news.ddtc.co.id/pemberian-bansos-dampak-covid-19-diperpanjang-sampai-desember-2020-21302>, Diakses pada 24 April 2021 Pkl 13:54 Wib.
20. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all>, Diakses pada 24 April 2021 Pkl 14:34 Wib.
21. <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/06/mensos-juliari-batubara-terjaring-ott-kpk-ini-jenis-bansos-yang-dikorupsi-fee-rp-10-ribu-per-paket?page=2>, Diakses pada 24 April 2021 Pkl 15:14 Wib.
22. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/091000965/alasan-di-balik-dana-bansos-yang-kerap-diselewengkan?page=all>, Diakses pada 24 April 2021 Pkl 14:54 Wib.
23. <http://id.wikipedia.org>, "Keadaan Darurat", diakses tanggal 10 Desember 2010.

24. <http://www.indonesiamedia.com>, “Kronologi Krisis di Indonesia“, diakses tanggal 21 April 2021.
25. <http://www.bi.go.id>, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, dan Peran IMF”, diakses tanggal 21 April 2021.
26. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19/>, diakses pada Rabu 28 April 2021, Pkl 14:20 Wib.